

ANCAMAN KEJAHATAN TRANSNASIONAL ALKI II TERHADAP KEAMANAN IKN 2019-2024

Muhammad Fezi Oktaferliandi¹, Rahmah Daniah²✉

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia.

✉Corresponding author: rahmabdaniah@fisip.unmul.ac.id

Article history

Received 2024-03-11 | Accepted 2024-03-16 | Published 2024-05-25

Abstrak

Relokasi ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur menimbulkan tantangan keamanan baru, khususnya terkait ancaman kejahatan transnasional di zona ALKI II. Sebagai jalur laut strategis, ALKI II berbatasan langsung dengan ibu kota baru dan berpotensi menjadi titik masuk kejahatan lintas negara. Berdasarkan perspektif Barry Buzan, ini termasuk dalam keamanan non-tradisional karena melibatkan aktor non-negara. Sementara itu, menurut Hans J. Morgenthau, keamanan ibu kota merupakan bagian dari kepentingan nasional vital – jika ibu kota tidak aman, stabilitas negara terancam. Penelitian menunjukkan enam jalur utama kejahatan transnasional di ALKI II, menjadikannya area rawan. Oleh karena itu, isu ini harus menjadi prioritas pemerintah. Salah satu solusi strategis adalah percepatan pengembangan teknologi pengawasan berbasis satelit, yang direncanakan rampung pada Tahap IV pembangunan ibu kota (2035-2039). Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat sistem keamanan nasional dan menjaga stabilitas ibu kota baru sebagai pusat pemerintahan.

Kata Kunci: Ibu Kota Nusantara, Keamanan Nasional, Kejahatan Transnasional, Zona ALKI II

ALKI II TRANSNATIONAL CRIME THREAT TO IKN SECURITY 2019-2024

Abstract

The relocation of Indonesia's capital from Jakarta to East Kalimantan brings new security challenges, particularly the threat of transnational crimes in the ALKI II zone. As a strategic maritime route bordering the future capital, ALKI II poses significant risks that demand government attention. These threats, involving non-state actors, align with Barry Buzan's concept of non-traditional security and Hans J. Morgenthau's view of national security as a vital interest. Research identifies six major transnational crime routes within ALKI II, highlighting its role as a potential entry point for illicit activities. Given the capital's central role in national stability, ensuring its security is critical. The government must prioritize the development and deployment of satellite-based surveillance technologies, planned for completion during Phase IV of capital development (2035–2039), to strengthen national defense and secure the new administrative center.

Keywords: Capital City of Nusantara, National Security, Transnational Crimes, Zone ALKI II

This is an open-access article under the CC-BY-SA license.



Copyright @ 2024 Muhammad Fezi Oktaferliandi, Rahmah Daniah

1. PENDAHULUAN

Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia ke Kalimantan Timur merupakan langkah strategis yang diambil pemerintah dalam rangka pemerataan pembangunan dan penanggulangan beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan. Kalimantan Timur dipilih karena letaknya yang lebih sentral secara geografis, serta potensinya untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi Jakarta, seperti kemacetan, banjir, dan polusi yang kian parah. Perpindahan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas administrasi pemerintahan, terutama dengan adanya peran ibu kota yang akan menjadi pusat kegiatan politik, ekonomi, dan administrasi negara di kawasan yang lebih dekat ke tengah Nusantara (Bappenas, 2022). Di sisi lain, pemindahan ini menuntut keamanan yang ketat, khususnya di wilayah perairan di sekitar ibu kota baru, yang berbatasan langsung dengan Zona Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II).

Zona ALKI II, yang merupakan bagian dari jalur laut strategis bagi Indonesia, membentang dari Selat Lombok hingga Laut Sulawesi. Zona ini penting dari koneksi internasional yang menghubungkan perairan Indonesia dengan jalur pelayaran global. Sebagai salah satu jalur yang sering dilalui kapal komersial besar dari berbagai negara, ALKI II tidak hanya menjadi penopang perdagangan regional tetapi juga pintu masuk bagi negara-negara lain untuk mengakses perairan Nusantara. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002, Indonesia mengatur pemanfaatan ALKI II, yang telah diakui secara internasional melalui pengajuan ke *International Maritime Organization* (IMO). Meski merupakan koridor perdagangan penting, ALKI II juga rawan terhadap aktivitas kejahatan lintas batas. Letaknya yang strategis, serta tingginya volume lalu lintas kapal, menempatkan zona ini pada posisi rentan terhadap berbagai bentuk ancaman, termasuk penyelundupan, terorisme, dan perdagangan manusia (Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, 2016).

Kejahatan lintas batas atau *transnational crime* di ALKI II menjadi isu serius yang membutuhkan perhatian dari pemerintah untuk menjamin keamanan ibu kota baru. Ancaman kejahatan ini termasuk penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, perompakan kapal, dan aktivitas ilegal lainnya yang kerap melibatkan aktor non-negara yang memanfaatkan celah pengawasan di wilayah perairan internasional. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (2023), pada tahun 2019 hingga 2022 terdapat 208.046 kapal dengan berbagai jenis dan ukuran yang melintas di sekitar perairan Kalimantan Timur, terutama di ALKI II. Peningkatan lalu lintas laut ini menambah kompleksitas dalam pengelolaan keamanan di wilayah tersebut, mengingat ibu kota Nusantara yang berdekatan langsung dengan ALKI II harus memiliki perlindungan maksimal dari risiko yang ditimbulkan oleh tingginya intensitas aktivitas laut, baik komersial maupun kriminal.

Ibu kota negara memegang peranan penting dalam perkembangan suatu bangsa, tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan wilayah itu sendiri, tetapi juga kemajuan secara keseluruhan (Syaban & Appiah-Opoku, 2023). Dalam idealnya, Ibu Kota Nusantara tidak seharusnya menghadapi ancaman signifikan, dengan pemerintah yang telah merancang strategi keamanan komprehensif dan efektif untuk menghadapi ancaman *transnational crimes* di zona ALKI II. Namun, kenyataannya menunjukkan bahwa ancaman tersebut masih ada. Pada 19 Mei 2024, tiga kapal nelayan asal Filipina ditangkap di Laut Sulawesi karena melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Kapal-kapal ini kemudian diarahkan ke Dermaga Tuhuna, Kepulauan Sangihe, bersama 13 awak kapal lainnya (Kharismaningtyas, 2024). Kasus ini mengindikasikan bahwa, meskipun upaya pengawasan sudah dilakukan, ancaman *illegal fishing* dan bentuk *transnational crimes* lainnya masih mengancam stabilitas kawasan sekitar ALKI II. Hal ini menimbulkan risiko yang perlu diwaspadai, khususnya dalam menjaga keamanan di Ibu Kota Nusantara. Berdasarkan hal tersebut penulis melakukan analisa Bagaimana Potensi Bentuk Ancaman *Transnational Crimes* Di Zona ALKI II Terhadap Keamanan Ibu Kota Nusantara Di Kalimantan Timur Tahun 2019-2024.

Penelitian ini berfokus pada ancaman *transnational crime* di Zona ALKI II dan dampaknya terhadap keamanan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Ancaman ini melibatkan aktivitas lintas batas yang dilakukan oleh aktor-aktor non-negara, seperti penyelundupan narkoba, perdagangan

manusia, dan perompakan, yang kian mengkhawatirkan seiring dengan meningkatnya lalu lintas di jalur laut strategis ini. Untuk memahami dampak ancaman tersebut terhadap keamanan ibu kota baru, penelitian ini menggunakan kerangka teori yang mengintegrasikan konsep ancaman *transnational crime* serta prinsip keamanan nasional, hal tersebut dijelaskan sebagai berikut;

Konsep Ancaman *Transnational Crime* Menurut Bary Buzan

Barry Buzan dalam *Security: A New Framework for Analysis* (Barry Buzan, 1998) menjelaskan bahwa ancaman keamanan dipahami sebagai segala sesuatu yang dapat mengancam kedaulatan atau integritas teritorial negara, sehingga respons keamanan berfokus pada kekuatan pertahanan untuk menghalau atau mencegah serangan. Keamanan dapat dipahami dari dua sudut pandang, yaitu tradisional dan non-tradisional. Pandangan tradisional menekankan bahwa ancaman utama terhadap keamanan berasal dari konflik militer antarnegara. Keamanan non-tradisional menurut Barry Buzan, mencakup ancaman-ancaman seperti terorisme, penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, dan kejahatan transnasional lainnya. Ancaman ini sering kali datang dari jaringan internasional atau aktor non-negara yang memiliki kemampuan untuk menciptakan ketidakstabilan tanpa menggunakan kekuatan militer (aktor negara).

Dalam konteks *Transnational Crimes* di zona ALKI II, ancaman ini lebih sesuai dikategorikan sebagai ancaman non-tradisional karena aktivitas ilegal di wilayah ini tidak melibatkan konflik antarnegara, melainkan tindakan kriminal lintas negara yang dilakukan oleh aktor non-negara. Keamanan non-tradisional fokus kepada penciptaan kondisi keamanan dari ancaman yang bersumber dari aktor non-negara atau non-state actor. Ancaman non-tradisional merupakan ancaman serius dalam aksinya contoh seperti Terorisme, Penyelundupan Narkoba, TKI Ilegal/People Smuggling, Perdagangan Manusia/Human Trafficking, Penangkapan Ikan Ilegal/Illegal fishing, dan Perompakan Kapal. Aktor dalam ancaman non-tradisional ini adalah tidak terbatas pada negara dan tidak berkaitan dengan militer, namun ancaman non-tradisional ini memberikan dampak terhadap keamanan manusia dan manusia merupakan aktor terpenting dalam negara apabila keamanan manusia terancam maka akan berdampak juga terhadap keamanan negara.

Konsep Keamanan Nasional Menurut Hans J. Morgenthau

Dalam buku *Politics Among Nations*, (Hans J. Morgenthau, 1998) menjelaskan bahwa konsep keamanan nasional mencakup perlindungan terhadap integritas teritorial, kedaulatan, dan keberlangsungan negara dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu stabilitas dan eksistensinya. Keamanan nasional, dalam pandangan ini, dianggap sebagai prioritas utama dalam kebijakan suatu negara karena tanpa stabilitas dan kelangsungan tersebut, fungsi-fungsi lainnya tidak dapat terjamin. Hans J. Morgenthau menggarisbawahi bahwa negara harus menjaga kemampuan mereka untuk mempertahankan diri dari ancaman-ancaman ini, baik dari dalam maupun luar negeri, karena keamanan adalah fondasi dari kelangsungan suatu bangsa. Hans J. Morgenthau juga memperkenalkan konsep kepentingan nasional yang terdiri dari dua bagian, yaitu kepentingan primer (vital) dan sekunder. Kepentingan primer, menurutnya, adalah kepentingan yang secara langsung terkait dengan keberlangsungan hidup suatu negara, termasuk perlindungan terhadap wilayah, rakyat, dan institusi politiknya.

Jika ancaman terhadap kepentingan vital ini muncul, negara harus segera merespons dengan segala cara, bahkan melalui penggunaan kekuatan militer jika diperlukan, karena ancaman ini dianggap bisa langsung mengancam eksistensi negara tersebut. Kepentingan vital inilah yang menjadi landasan bagi tindakan negara dalam menghadapi berbagai ancaman yang dapat merusak stabilitas internal dan mempengaruhi keseimbangan kekuatan dalam sistem internasional. Sebagai jalur yang menghubungkan perairan internasional dengan Indonesia, ALKI II menjadi titik rawan aktivitas kejahatan lintas negara seperti terorisme, penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, dan perompakan kapal. Ancaman-ancaman ini tidak hanya berpotensi mengganggu ketertiban di sekitar ibu kota, tetapi juga dapat berdampak langsung pada stabilitas dan keamanan nasional secara keseluruhan.

Dalam konteks teori keamanan vital dari Hans J. Morgenthau, ibu kota negara dianggap sebagai simbol kedaulatan dan pusat pemerintahan yang vital bagi kelangsungan negara. Hans J. Morgenthau menekankan bahwa setiap ancaman terhadap ibu kota adalah ancaman langsung terhadap stabilitas negara itu sendiri. Konsep ini relevan dengan penelitian ini karena Ibu Kota Nusantara akan menjadi pusat politik dan administratif Indonesia, sehingga ancaman terhadapnya merupakan ancaman terhadap kepentingan nasional secara keseluruhan. Lebih lanjut, pemahaman Hans J. Morgenthau terhadap kepentingan nasional tidak hanya didasarkan pada pengembangan kekuatan, tetapi juga mencakup ide kepentingan hidup yang esensial bagi kesejahteraan fisik dan mental suatu negara.

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *descriptive case study research*. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *library research* dan *online research*. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan cara metode kualitatif.

Ancaman Transnational Crimes di Zona ALKI II terhadap Keamanan Ibu Kota Negara Nusantara Di Kalimantan Timur Tahun 2019-2024

Pada hasil penelitian dan pembahasan yang ada ini penulis membahas yang terdiri dari tiga sub-bab utama. Pertama menggambarkan mengenai konsep ancaman transnasional yang digunakan dalam ancaman potensial dan yang terjadi di Zona ALKI II. Selanjutnya akan memetakan jalur-jalur ancaman transnasional yang sering terjadi di zona ALKI II, memberikan gambaran rinci mengenai rute-rute yang digunakan oleh para pelaku kejahatan. Pembahasan berikutnya akan mengevaluasi keamanan Ibu Kota Nusantara di Zona ALKI II dari perspektif keamanan nasional yang diadopsi dari konsep keamanan nasional.

Potensi Bentuk-bentuk Ancaman Transnational Crimes di Zona ALKI II Terhadap Ibu Kota Nusantara

Pendekatan yang digunakan oleh Barry Buzan ini berfokus pada konsep keamanan non-tradisional, di mana aktor yang berperan adalah aktor non-negara (*non-state actors*). Keamanan non-tradisional menurut (Barry Buzan, 1998) mencakup ancaman-ancaman yang tidak bersifat militer dan sering kali melibatkan aktor non-negara. Dalam konteks ancaman *transnational crimes* di zona ALKI II, pendekatan non-tradisional menjadi sangat relevan karena aktor-aktor yang terlibat dalam kegiatan ilegal tersebut.

- 1) Dalam Konteks Terorisme Posisi ALKI II yang dekat dengan wilayah rawan seperti Sabah dan Sulu memudahkan jalur bagi jaringan terorisme lintas negara. Beberapa kasus penangkapan teroris di Samarinda menunjukkan ancaman yang terus berlangsung di wilayah ini terlihat pada tahun 2023 anggota 88 Antiteror Polri di Samarinda menangkap pelaku terorisme (Umarul Faruq, 2023).
- 2) Mengenai Penyelundupan Narkoba ALKI II, terutama di Selat Makassar, digunakan oleh kartel narkoba untuk mengedarkan narkoba ke Indonesia. Pada tahun 2024, sekitar 32 kg sabu disita di Samarinda, memperlihatkan tingginya risiko penyelundupan di jalur ini (Niken Dwi Sitoningrum, 2024).
- 3) Terdapat Perdagangan Manusia didalam kasus ini, Wilayah ALKI II juga menjadi rute utama untuk perdagangan manusia, terutama di Nusa Tenggara Timur, yang sering kali menjadi titik pengiriman tenaga kerja ilegal. Pada 2023, lebih dari 1.500 korban perdagangan manusia berhasil diselamatkan di kawasan ini (Mahetza Hardanto, 2019).
- 4) Mengenai TKI Ilegal terdapat Ribuan tenaga kerja Indonesia ilegal dikirim melalui jalur ALKI II, dengan mayoritas berasal dari provinsi seperti NTT dan Jawa Timur, yang berpotensi meningkatkan tekanan sosial dan ekonomi di sekitar IKN (Siregar, 2021).

- 5) Dalam hal Penangkapan Ikan Ilegal Nelayan asing sering melakukan aktivitas penangkapan ikan ilegal di zona ini, mengancam ketahanan pangan lokal dan menimbulkan ketegangan dengan aparat keamanan, Kapal nelayan (berbendera Malaysia) menggunakan alat tangkap Jaring Tarik Berkantong (JTB) dengan hasil tangkapan masing-masing mencapai kurang lebih 20 ton ikan campur (Maulandy Rizky Bayu, 2024).
- 6) Terdapat Perompakan Kapal di Selat Makassar, yang merupakan bagian dari ALKI II, sering menjadi lokasi perompakan. Pada 2024, kapal yang berlayar dari Kalimantan Selatan menjadi korban penyanderaan, menyoroti ancaman perompakan yang semakin sering terjadi dan berpotensi mengganggu stabilitas maritim (Mimbar Maritim, 2024).

Secara keseluruhan, ancaman-ancaman ini memperlihatkan betapa rentannya ALKI II terhadap *transnational crimes*, yang dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional dan mengancam perkembangan IKN.

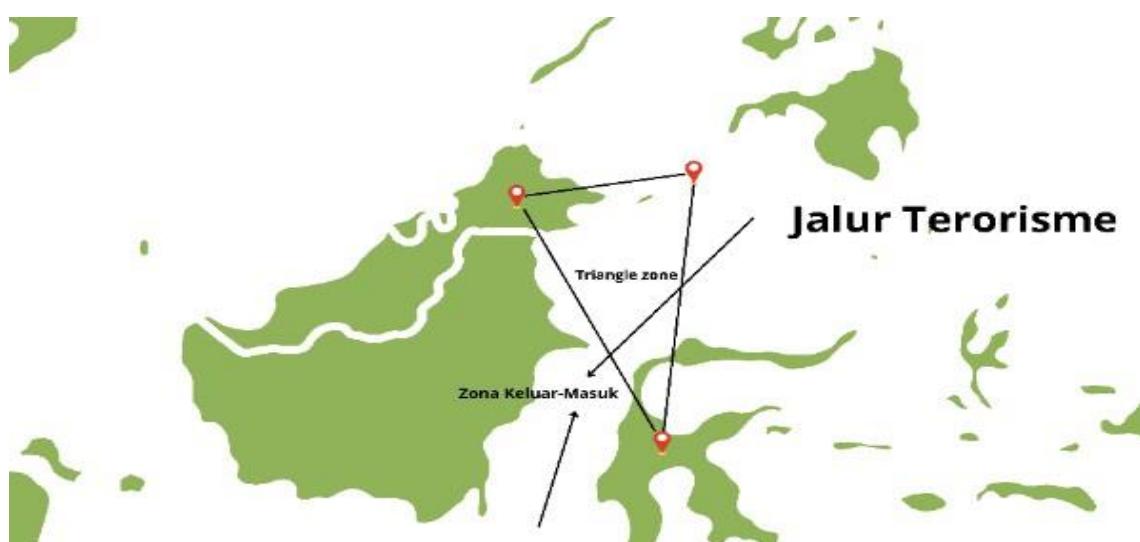
Pemetaan Jalur-jalur *Transnational Crimes* di Zona ALKI II

Zona ALKI II, yang mencakup Laut Sulawesi, Selat Makassar, Laut Flores, dan Selat Lombok, merupakan salah satu jalur pelayaran internasional yang paling strategis di Indonesia. Selat Makassar yang bersebelahan dengan Ibu Kota Nusantara memiliki panjang sekitar 600 kilometer dari utara ke selatan, lebar selat antara 100 hingga 200 kilometer, dan memiliki kedalaman beberapa ratus meter hingga sekitar 2 kilometer (Fahmi Alfansi, 2022). Letak Selat Makassar jauh dari jalur pelayaran konvensional di Selat Malaka. Namun, karena kedalaman dan lebarnya, jalur ini cocok untuk dilalui kapal pengangkut minyak mentah ultra-besar yang mencari akses ke pasar Asia Timur.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2019 hingga 2022, jumlah kapal yang datang dan keluar di Kalimantan Timur menunjukkan tren yang signifikan. Pada tahun 2019, tercatat sebanyak 41.631 kapal yang datang ke pelabuhan di Kalimantan Timur (Statistik Transportasi Laut, 2019). Angka ini mengalami peningkatan pada tahun 2020, di mana sebanyak 47.449 kapal tercatat berangkat dan keluar dari wilayah tersebut (Statistik Transportasi Laut, 2020). Pada tahun 2021, jumlah kapal yang datang meningkat lebih lanjut menjadi 57.477 kapal (Statistik Transportasi Laut, 2021). Tren peningkatan ini berlanjut pada tahun 2022, dengan jumlah kapal yang datang mencapai 64.699 kapal (Statistik Transportasi Laut, 2022). Data ini menunjukkan adanya

peningkatan aktivitas maritim yang konsisten dari Kalimantan Timur selama empat tahun tersebut. Maka dari itu berikut ini merupakan jalur ancaman *transnational crimes*.

Jalur Terorisme



Gambar 1. Jalur Terorisme di zona ALKI II

Selat Makassar di ALKI II menjadi titik masuk dan keluar yang ideal bagi jaringan terorisme, terutama dengan rute yang menghubungkan Kalimantan Timur dengan wilayah-wilayah rawan seperti Sabah, Sulu, dan Poso. "Triangle Zone" ini memungkinkan mobilisasi dan interaksi jaringan terorisme lintas batas, dengan IKN di Kalimantan Timur yang berdekatan menjadi target potensial jika tidak ada pengamanan yang ketat (Hanita, 2018). Posisi Kalimantan Timur, yang menjadi lokasi ibu kota Nusantara, berada dalam jangkauan langsung dari jalur-jalur ini, sehingga menimbulkan potensi ancaman yang signifikan terhadap stabilitas dan keamanan wilayah tersebut. Gangguan terhadap keamanan ibu kota baru Indonesia di Kalimantan Timur sangat mungkin terjadi jika tidak ada langkah strategis dalam memperkuat pengamanan maritim dan pengawasan perbatasan.

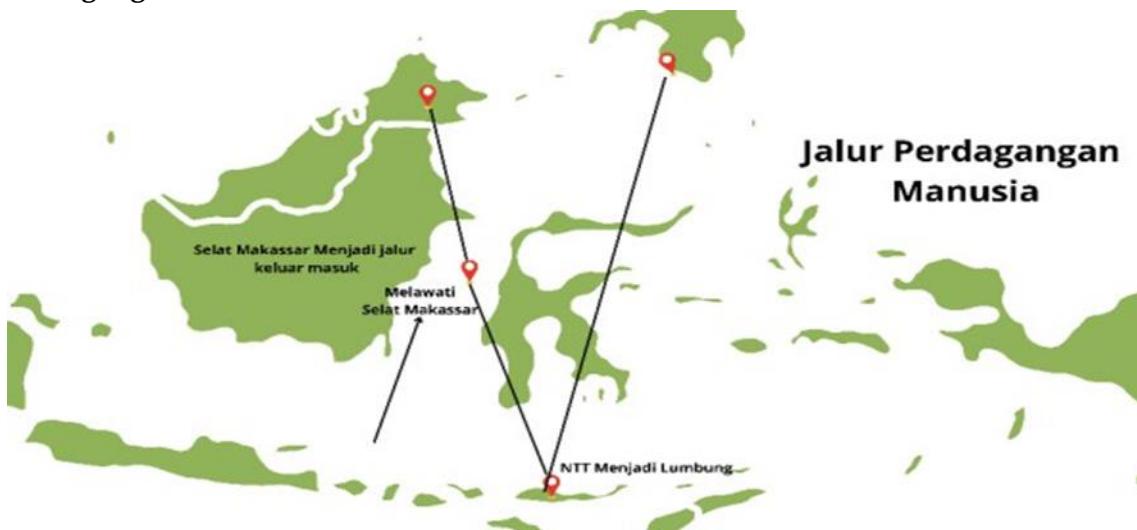
Jalur Peredaran Narkoba



Gambar 2. Jalur Peredaran Narkoba Di Zona ALKI II

ALKI II, khususnya Selat Makassar, digunakan sebagai jalur utama untuk distribusi narkoba. Sekitar 70% narkoba di Indonesia didistribusikan melalui jalur laut, dan perairan ini memfasilitasi penyelundupan dari negara-negara tetangga. Rute ini juga memperlihatkan tingginya risiko infiltrasi narkoba dari Malaysia melalui Kalimantan, yang berpotensi menjangkau IKN (Siregar, 2021)

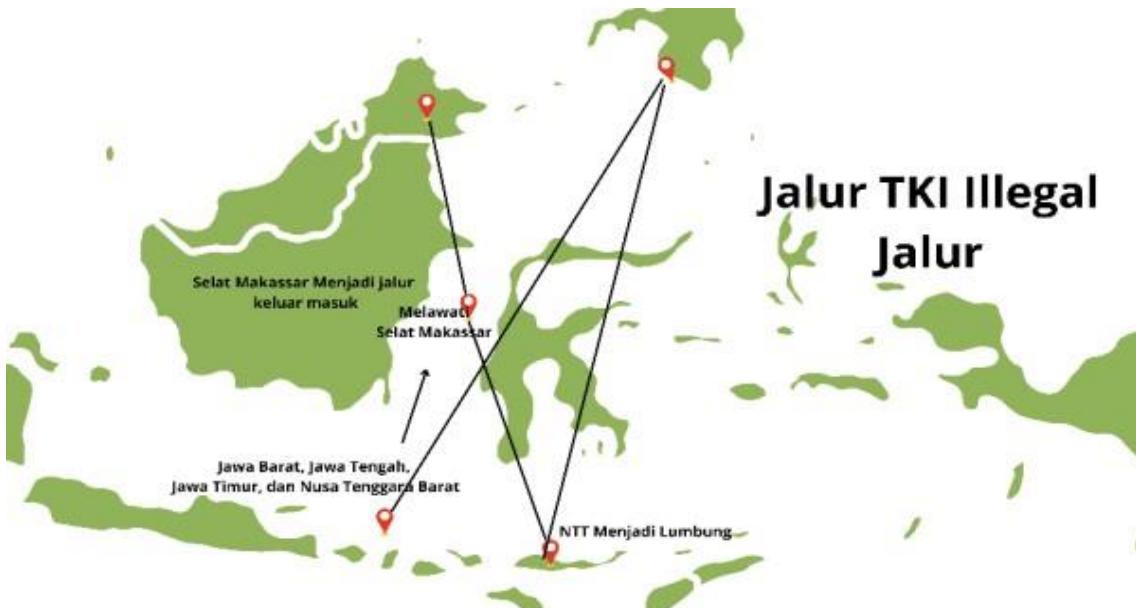
Jalur Perdagangan Manusia



Gambar 3. Jalur Perdagangan Manusia di zona ALKI II

ALKI II menjadi jalur signifikan bagi perdagangan manusia, dengan Nusa Tenggara Timur sebagai titik asal utama. Jalur ini dimanfaatkan oleh jaringan perdagangan manusia internasional yang mengirim tenaga kerja ilegal ke negara-negara lain, melalui Selat Makassar sebagai rute keluar-masuk utama untuk aktivitas ini (Pizaro Gozali Idrus, 2023).

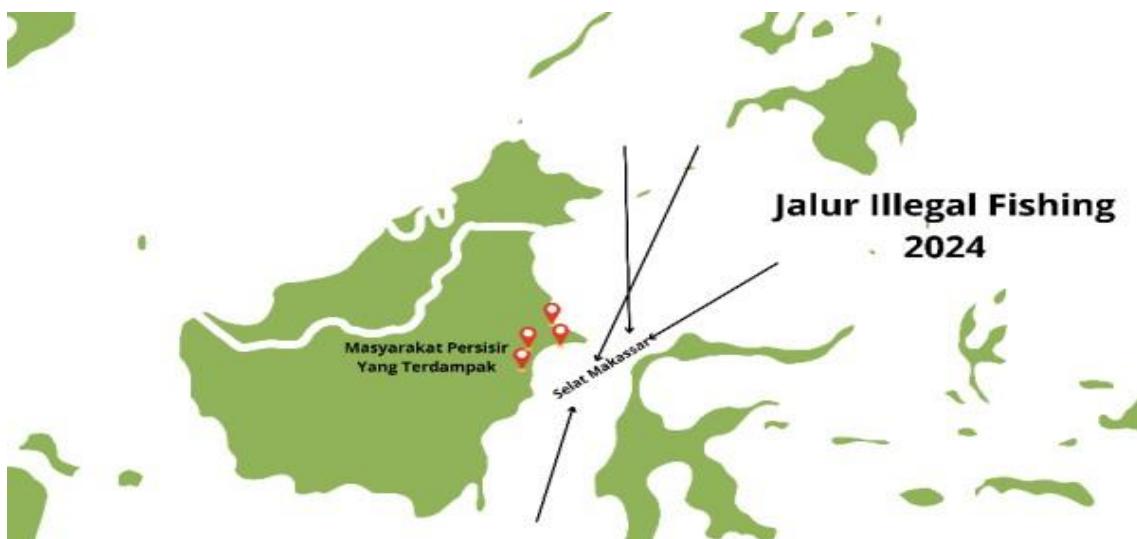
Jalur TKI Ilegal



Gambar 4. Jalur TKI Illegal di zona ALKI II

Banyaknya TKI ilegal yang diberangkatkan tanpa dokumen resmi melalui ALKI II menunjukkan tingginya penggunaan Selat Makassar sebagai jalur penyelundupan TKI ilegal. Jalur ini strategis karena lalu lintas laut yang padat memungkinkan pengiriman tanpa pengawasan ketat, menimbulkan masalah sosial dan ekonomi di wilayah transit dan tujuan (Siregar, 2021). Laporan dari PBB menyatakan bahwa setiap tahun, sekitar 100.000 hingga satu juta orang menjadi korban perdagangan manusia di Indonesia, dengan banyak dari mereka dijual untuk menjadi pekerja seks atau buruh paksa. Fenomena ini menunjukkan betapa kompleksnya tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menangani ancaman perdagangan manusia, terutama di jalur-jalur kritis seperti Selat Makassar (Ambari, 2024).

Jalur Penangkapan Ikan Ilegal



Gambar 5. Jalur Illegal Fishing di zona ALKI II

ALKI II, terutama di Selat Makassar dan Laut Sulawesi, menjadi lokasi penangkapan ikan ilegal oleh kapal asing. Hal ini berdampak langsung pada ketahanan pangan masyarakat lokal dan kedaulatan wilayah perairan Indonesia (Razi, 2019). Peta tersebut menandai area masyarakat pesisir yang terdampak di wilayah pesisir kalimantan, yang sering menjadi korban dari tindakan illegal fishing. Wilayah Selat Makassar, yang juga menjadi bagian dari Zona ALKI II, kerap kali menjadi sasaran operasi penangkapan ikan ilegal. Fenomena ini memperlihatkan ancaman serius bagi keberlanjutan ekosistem laut di kawasan tersebut serta dampak negatifnya terhadap masyarakat pesisir yang bergantung pada sektor perikanan untuk kehidupan sehari-hari.

Jalur Perompakan Kapal



Gambar 6. Jalur Perompakan Kapal di zona ALKI II

Selat Makassar yang padat digunakan oleh kapal-kapal internasional juga menjadi jalur yang rentan terhadap perompakan. Pada tahun 2024, peristiwa perompakan yang melibatkan kapal yang berlayar dari Kalimantan Selatan mengilustrasikan ancaman serius bagi keamanan maritim dan ekonomi IKN jika aktivitas ini tidak diawasi ketat (Mimbar Maritim, 2024). Ketidakstabilan maritim seperti ini bisa membuat investor asing ragu untuk menanamkan modal di kawasan tersebut, mengingat risiko keamanan yang tinggi.

Dampak Potensi Ancaman Transnational Crime terhadap Keamanan Ibu Kota Nusantara

Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur menghadapi tantangan serius terkait keamanan, terutama karena lokasinya yang berdekatan dengan Zona Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II. Sebagai jalur yang menghubungkan perairan internasional dengan Indonesia, ALKI II menjadi titik rawan aktivitas kejahatan lintas negara seperti terorisme, penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, dan perompakan kapal. Ancaman-ancaman ini tidak hanya berpotensi mengganggu ketertiban di sekitar ibu kota, tetapi juga dapat berdampak langsung pada stabilitas dan keamanan nasional secara keseluruhan.

Dalam teori keamanan vital yang dikemukakan oleh Hans J. Morgenthau, ibu kota negara merupakan simbol kedaulatan dan pusat pemerintahan yang sangat penting bagi keberlangsungan negara. Morgenthau menegaskan bahwa setiap ancaman terhadap ibu kota juga merupakan ancaman terhadap stabilitas negara secara keseluruhan. Berdasarkan analisis pada sub bab 4.1 dan 4.2, terdapat potensi ancaman signifikan di zona ALKI II, yang berdekatan dengan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Potensi ancaman ini sejalan dengan konsep keamanan vital, di mana setiap ancaman terhadap ibu kota memiliki dampak langsung terhadap stabilitas nasional. Ancaman yang ada di zona ALKI II pun semakin memperkuat risiko terhadap keamanan dan stabilitas di sekitar Ibu Kota Nusantara.

Kepentingan nasional primer (*Vital*) berhubungan langsung dengan perlindungan terhadap identitas fisik, politik, serta keamanan dan kelangsungan hidup suatu negara. Dalam konteks ini, kerentanan Ibu Kota Nusantara yang berada di Zona ALKI II terhadap berbagai ancaman, termasuk *Transnational Crime*, menjadikan kawasan ini sebagai bagian dari kepentingan nasional vital. Kepentingan nasional primer ini terkait dengan perlindungan terhadap identitas fisik, politik, serta keamanan dan keberlangsungan hidup suatu negara namun dalam konsep ini terdapat kerentanan posisi ibu kota nusantara yang berada di zona ALKI II menjadi tempat yang rentan terhadap berbagai *transnational crimes* maka berdasarkan hal ini kasus di zona ALKI II terhadap Ibu Kota Nusantara masuk ke dalam kepentingan nasional primer.

Konsep deteksi dini dan peringatan dini sangat penting untuk mengidentifikasi dan mencegah potensi ancaman sebelum mereka berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Dalam praktiknya, ini bisa melibatkan teknologi canggih seperti sistem radar, drone pengawasan, dan satelit untuk memonitor aktivitas maritim secara *real-time*, serta pelatihan intensif bagi personel keamanan untuk merespon ancaman dengan cepat dan efektif

Konsep keamanan nasional juga mencakup pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan penegakan hukum yang efektif di wilayah maritim Indonesia. Pemerintah Indonesia sudah membuat konsep pertahanan sesuai dengan (Undang-undang Nomor 21 Tahun 2023) tentang keamanan laut ibu kota negara menggunakan *smart defense* dan *dual strategy*. maka *Virtual Maritime Gate* salah satu strategi jalur lautnya, tentu hal ini mencerminkan semakin besarnya kepentingan strategis Selat Makassar bagi Indonesia dalam jangka menengah dan panjang akan tetapi pada saat penulisan penelitian ini baru terealisasikan pembangunan ibu kota nusantara tahap 1 pada tahun 2024 maka penerapan sistem teknologi seperti ini akan rampung di targetkan pada pembangunan tahap IV di tahun 2035-2039 yang sudah merampungkan pembangunan.

4. KESIMPULAN

Ancaman *transnational crime* di Zona ALKI II mencerminkan tantangan keamanan non-tradisional yang melibatkan berbagai kegiatan ilegal, seperti terorisme, penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, pengiriman tenaga kerja ilegal, penangkapan ikan ilegal, dan perompakan kapal. Ancaman-ancaman ini, sesuai analisis Barry Buzan (1998), tidak terkait langsung dengan kekuatan militer negara namun memiliki dampak serius pada keamanan masyarakat, karena beroperasi melalui jaringan aktor non-negara di wilayah perbatasan yang kompleks.

Zona ALKI II memiliki enam jalur utama kejahatan lintas batas. Di utara, *Triangle Zone* (Sabah, Sulu, dan Poso) menjadi jalur perpindahan teroris yang memanfaatkan celah pengawasan. Sementara itu, jalur dari Sabah ke Kalimantan Utara serta Sarawak ke Kalimantan Barat dimanfaatkan sebagai rute penyelundupan narkoba yang dekat dengan wilayah IKN. Di selatan, NTT berperan sebagai titik perdagangan manusia, dengan Selat Makassar sebagai jalur sibuk bagi penyelundupan TKI ilegal. Jalur *illegal fishing* oleh kapal asing melalui Selat Makassar di timur semakin membahayakan mata pencarian nelayan lokal. Selain itu, pada tahun 2024 terjadi insiden perompakan selama 27 jam di perairan tenggara ALKI II, menandai meningkatnya ketidakamanan di perairan ini.

Lalu dari sisi Keamanan Ibu Kota Nusantara memegang peranan vital dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan Indonesia, oleh karena itu, jika keamanan IKN terancam, maka stabilitas nasional akan terganggu. Dalam konteks ancaman transnasional, Indonesia menghadapi risiko yang signifikan di zona Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II, yang merupakan jalur lalu lintas penting di perairan internasional. Ancaman dari aktivitas illegal, seperti penyelundupan dan terorisme, yang dapat memanfaatkan celah pengawasan di wilayah maritim ini, mempertegas pentingnya upaya peningkatan keamanan.

Keamanan Ibu Kota Nusantara sangat penting bagi stabilitas nasional. Ancaman di ALKI II menegaskan pentingnya respons keamanan, terutama menghadapi risiko penyelundupan dan terorisme yang memanfaatkan celah pengawasan maritim. Pemerintah merespons dengan mengembangkan teknologi *Unmanned Aerial Vehicle* (UAV) dan sistem *Virtual Maritime Gate* untuk

mendukung deteksi dini dan pengawasan lebih efisien di perairan yang luas, sekitar 7,9 juta km². Sistem UAV memungkinkan pengawasan jarak jauh, sementara *Virtual Maritime Gate* mengumpulkan intelijen maritim yang krusial, mendeteksi kapal tak berawak dan kapal selam yang berpotensi mengancam IKN dan stabilitas nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambari. (2024). Intrusi Kapal Ikan Asing ke Perairan Indonesia Semakin Berani, Mongabay.
- Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah. (2016). Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024.
- Badan Pusat Statistik. (2019). Statistik transportasi laut 2019. Jakarta: Badan Pusat Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2020). Statistik transportasi laut 2020. Jakarta: Badan Pusat Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2021). Statistik transportasi laut 2021. Jakarta: Badan Pusat Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2022). Statistik transportasi laut 2022. Jakarta: Badan Pusat Pusat Statistik.
- Bappenas. (2022). Bappenas Tekankan Tujuan Besar IKN Untuk Mewujudkan Visi Indonesia 2045. Bappenas.
- Barry Buzan, O. W. (1998). Security: A New Framework for Analysis. Colorado, USA: Lynne Rienner Publisher.
- Fahmi Alfansi. (2022). Pembangunan Pertahanan Ibu Kota.
- Hanita, M. (2018). Radikalisme dalam Masyarakat Multikultural: Ancaman Lokal dan Tantangan Global. Jurnal Cendekia Waskita.
- Mahetza Hardanto, F. (2019). Kerjasama Polri Dengan New Zealand Police Dalam Menangani Kejahatan Maritim di Indonesia: Studi Kasus Sindikat People Smuggling By Sea oleh Kapten Bram. Journal of International Relations (Vol. 5). <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jiri>.
- Maulandy Rizky Bayu. (2024). Cegah Konflik Antar Nelayan, KKP Tangkap 2 Kapal Ikan di Selat Makassar.
- Mimbar Maritim. (2024). KPLP (Coast Guard) Pangkalan PLP Kelas I Tanjung Priok Melalui Kapal Patroli KN. Jembio – P.215 Responsive Insiden Perompakan Kapal TB. Royal 27/TK Royal 27 di Perairan Kalsel.
- Morgenthau, Hans J. (1978). Politics Among Nations (Sixth Edition). New York: Alfred A. Knopf. Inc.
- Niken Dwi Sitoningrum. (2024). Polda Kaltim Gagalkan Penyelundupan 32 Kg Sabu, 3 Pelaku Ditangkap. Detiksulsel.
- Pizaro Gozali Idrus. (2023). Polisi tangkap 500 lebih tersangka perdagangan orang dalam dua pekan. Benar News.
- Razi. (2019). KKP tangkap tiga kapal ilegal asal Filipina di Laut Sulawesi. Antara.
- Siregar, W. A. (2021). BNN: 90 Persen Penyelundupan Narkoba Lewat Jalur Laut. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (2023).
- Ummarul Faruq. (2023). Densus 88 Tangkap Bendahara Jaringan Jemaah Islamiyah di Samarinda. CNN Indonesia.